

# LAPORAN TRIWULAN I



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

# 2020

## PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI

## KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Standardisasi Industri kepada stakeholder dan pihak terkait maka disusun Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (PP 39) TRIWULAN I Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Hal ini merupakan perwujudan komitmen manajemen Pusat Standardisasi Industri dalam merealisasikan Peraturan Pemerintah RI No. 39 Tahun 2006, sebagai penerapan prinsip-prinsip transparansi yang akuntabel. Laporan ini memuat seluruh kegiatan pada Pusat Standardisasi Industri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang dibiayai dari DIPA tahun 2020.

Substansi laporan didasarkan pada program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis pada Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja (Perjakin) Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020. Demikian pula halnya dengan rencana dan pengukuran kinerja Tahun 2020 diselaraskan dengan sasaran, tujuan, misi dan visi yang telah ditentukan dalam Renstra Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 – 2024.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembuat kebijakan serta peningkatan bagi seluruh pegawai pada Pusat Standardisasi Industri dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait.

Jakarta, 3 April 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



**Ni Nyoman Ambareny**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	1
1.2 LATAR BELAKANG KEGIATAN/PROGRAM.....	1
1.3 STRUKTUR ORGANISASI .....	3
BAB II RENCANA .....	5
PROGRAM/KEGIATAN .....	5
2.1 KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2020 .....	5
2.2 SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN .....	6
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN.....	7
3.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	7
3.1.1 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	
BERDASARKAN INDIKATOR DALAM PERJANJIAN KINERJA.....	9
3.1.2 HASIL YANG TELAH DICAPAI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA .....	
BERDASARKAN INDIKATOR PADA KINERJA OUTPUT KEGIATAN.....	15
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN .....	22
3.2.1 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA.....	38
3.2.2 HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN KINERJA <i>OUTPUT</i> .....	
KEGIATAN .....	22
3.3 LANGKAH TINDAK LANJUT .....	22
3.3.1 LANGKAH DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KINERJA .....	
.....	22
3.3.2 LANGKAH DAN TINDAK LANJUTPELAKSANAAN KINERJA OUTPUT .....	
KEGIATAN .....	23
BAB IV PENUTUP .....	23
LAMPIRAN .....	23
FORM A	
- FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI	
- FORM ALKI	

## DAFTAR GAMBAR, TABEL DAN LAMPIRAN

GAMBAR 1. STRUKTUR ORGANISASI PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI.....	4
TABEL 2.1 DAFTAR KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020.....	5
TABEL 2.2 SASARAN KEGIATAN PUSTAN INDUSTRI TAHUN 2020 .....	5
TABEL 2.3 INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN OUTPUT KEGIATAN.....	6
TABEL 3.1 RENCANA AKSI PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2020 .....	7
TABEL 3.2 REALISASI PENCAPAIAN TRIWULAN I PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI .....	9
TABEL 3.3 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN I TRIWULAN I PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	10
TABEL 3.4 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN II TRIWULAN I PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	12
TABEL 3.5 PENCAPAIAN SASARAN KEGIATAN III TRIWULAN I PERJAKIN PUSTAN INDUSTRI TA 2020.....	13
TABEL 3.6 PAGU ANGGARAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2020 .....	15
TABEL 3.7 REALISASI OUTPUT I SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2020 .....	15
TABEL 3.8 REALISASI OUTPUT II SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2020 .....	16
TABEL 3.9 REALISASI OUTPUT III SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2020 .....	17
TABEL 3.10 REALISASI OUTPUT IV SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2020.....	18
TABEL 3.11 REALISASI OUTPUT V SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2020.....	18
TABEL 3.12 REALISASI OUTPUT VI SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TA 2020.....	19

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Tugas, Pokok dan Fungsi Organisasi**

Pusat Standardisasi Industri merupakan salah satu unit di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian. Menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Pusat Standardisasi Industri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian, pengembangan, dan promosi di bidang standardisasi industri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pustan Industri menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan dan penguatan standardisasi industri;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penerapan, pemberlakuan, dan kerja sama standardisasi industri;
- c. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri; dan
- d. pelaksanaan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga unit kerja.

### **1.2. Latar Belakang Kegiatan**

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi standar bidang industri yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan. Hingga saat ini terdapat 4.977 SNI bidang industri dari 11.740 SNI secara nasional. Perumusan SNI dilakukan oleh Komite Teknis/SubKomite Teknis di lingkungan Kemenperin sebanyak 34 KT/SKT yang mencakup berbagai produk/komoditi industri binaan Kementerian Perindustrian. Setiap tahun Komite Teknis/SubKomite Teknis membuat Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) yang disesuaikan dengan kebutuhan industri maupun kebutuhan pasar.

Untuk kepentingan keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan; pelestarian fungsi lingkungan hidup; persaingan usaha yang sehat; peningkatan daya saing;

dan/atau peningkatan efisiensi dan kinerja industri, maka pemerintah dapat memberlakukan SNI secara wajib.

Hingga akhir TRIWULAN I tahun 2020 SNI telah diberlakukan 113 SNI secara wajib bidang industri yang meliputi komoditi makanan, minuman, kimia, logam, tekstil dan aneka, permesinan, alat transportasi darat, dan elektronika. Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama perdagangan secara internasional (WTO) maka Indonesia juga harus mengikuti aturan yang berlaku terkait bidang standardisasi misalnya seperti melakukan notifikasi jika Indonesia akan memberlakukan SNI secara wajib sesuai dengan mekanisme Technical Barriers to Trade (TBT) – WTO. Selain itu dalam kerjasama regional seperti ASEAN, standar juga telah menjadi perhatian utama dengan dibentuknya ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality (ACCSQ). Dari data yang ada dengan diberlakukannya SNI secara wajib, dapat dilihat dampak secara ekonomi dimana terjadi penurunan nilai impor terhadap produk yang SNI-nya diberlakukan secara wajib.

Dalam pelaksanaan regulasi teknis, banyak negara melakukan teknik-teknik yang tidak langsung mempersulit pelaku usaha untuk memasukkan produknya ke negara tersebut. Sebagai contoh, Uni Eropa harus dilakukan pengujian dan sertifikasi di lembaga yang terdaftar dalam notified body tersebut. Hal serupa dilakukan pula di US, Jepang, Tiongkok, India, dan negara lainnya.

Mengingat standar saat ini digunakan sebagai barrier di dalam mekanisme perdagangan, maka untuk mengatasi keberagaman skema sertifikasi, ditetapkanlah ISO 17067:2013 (Conformity Assessment – Fundamentals of Product Certification and Guidelines for Product Certification Scheme) mengenai skema sertifikasi yang memperkenankan regulator untuk menyusun skema sertifikasi terkait dengan standar yang ditetapkan menjadi regulasi teknis.

Dalam pelaksanaan penerapan SNI/ST secara wajib bidang industri, Menteri Perindustrian menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang terdiri dari Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) dan Laboratorium Penguji) yang diperkenankan memproses SPPT SNI/ST yang tentunya telah dilakukan evaluasi baik secara administrasi maupun kompetensi oleh BPPI sesuai prosedur kerja yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPPI Nomor 422 Tahun 2010 tentang Penunjukan, Pengawasan, dan Pelaporan Kinerja Lembaga Penilaian Kesesuaian. Skema sertifikasi yang nantinya telah dirumuskan oleh regulator menjadi bagian dari penilaian kelayakan penunjukan LPK.

### 1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pustan Industri mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Susunan organisasi Pustan Industri berdasarkan Permenperin tersebut yaitu:

1. Bidang Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Perumusan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2. Bidang Penerapan, Pemberlakuan, dan Kerja Sama Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Kerja Sama Standardisasi Industri;
3. Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
  - a. Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri;
  - b. Subbidang Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
4. Subbagian Program dan Tata Usaha;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini merupakan struktur organisasi di Pusat Standardisasi Industri:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pusat Standardisasi Industri

## BAB II RENCANA KEGIATAN

### 2.1. Kegiatan Tahun Anggaran 2020

Pustan Industri berdasarkan kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri mempunyai satu kegiatan yaitu Perencanaan Kebijakan Standardisasi Industri. Kegiatan ini memiliki komponen kegiatan seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar kegiatan Pustan Industri Tahun Anggaran 2020

1860	Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri
1860.001	<b>Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri</b>
	Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk Ikm dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri
	Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain
	Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)
	Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI
1860.002	<b>Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri</b>
	Pengawasan Standardisasi Industri
	Penegakan Hukum Standardisasi Industri
1860.003	<b>Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri</b>
	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri
1860.004	<b>Pengembangan Standardisasi Industri</b>
	Perumusan RSNI, ST dan/atau PTC
	Peninjauan SNI
	Kajian Standardisasi
1860.005	<b>Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian</b>
	Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib
1860.010	<b>Layanan Manajemen Satker</b>
	Penyusunan Program dan Rencana Kerja
	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

### 2.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2020

Berdasarkan Rencana Strategis Pustan Industri dan Rencana Kinerja, Pustan Industri pada Tahun 2020 menetapkan sasaran kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja (Perjakin) 2020 dengan indikator kinerja seperti pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Sasaran Kegiatan Pustan Industri Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam	SNI bidang industri yang diterapkan	5%



	negeri		
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	Nilai >80.1

Indikator kinerja berdasarkan output kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Berdasarkan Output Kegiatan

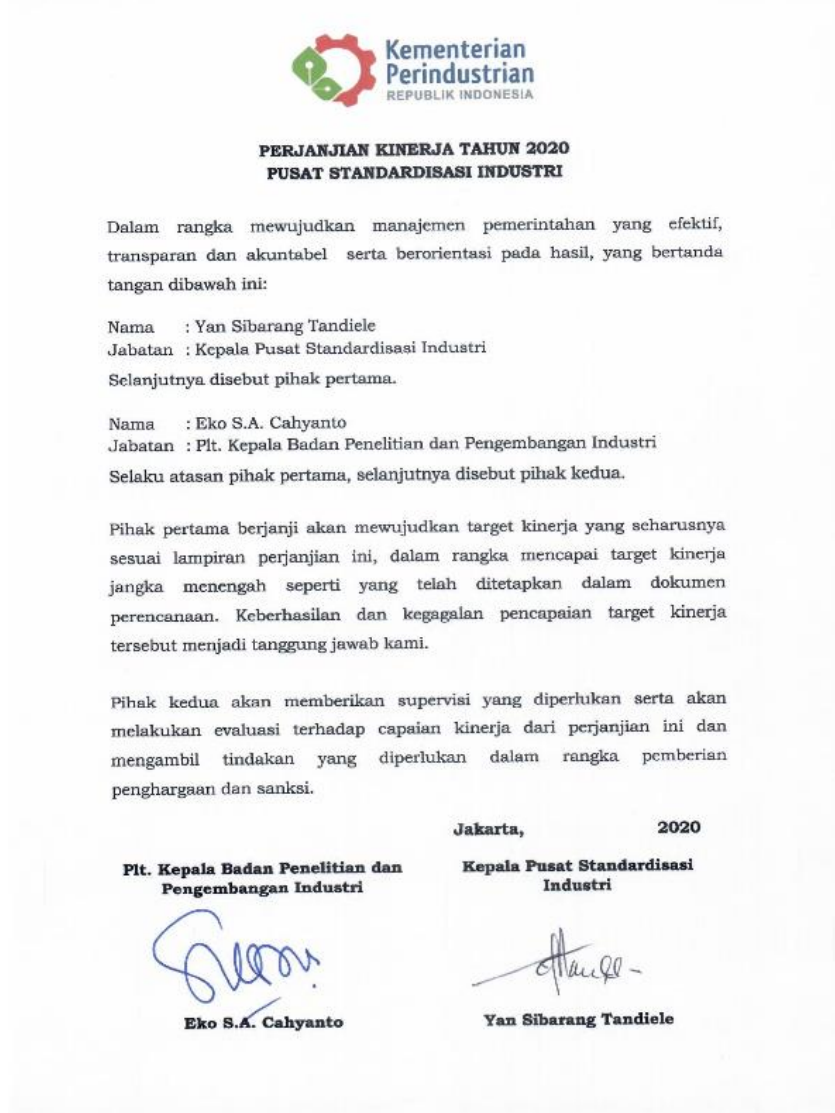
Kode	Output	Indikator Kinerja	Target
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	Tersedianya Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk IkM dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Penunjukan LPK	15 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Teknis Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	1 Regulasi
		Tersedianya Regulasi Manajemen PPSI	1 Regulasi
1860.002	Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	Pengawasan Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
		Penegakan Hukum Standardisasi Industri	5 Rekomendasi
1860.003	Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	Jumlah Personil PPNS-I	20 Orang
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	Tersedianya RSNI, ST dan/atau PTC	100 Standar
		Jumlah SNI yang ditinjau	1 Laporan
		Jumlah Kajian Standardisasi	2 Kajian
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	Jumlah Alat	10 Unit
1860.010	Layanan Manajemen Satker	Tersedianya Dukungan Teknis Manajemen Kinerja	1 Laporan

## BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1. Hasil dan Analisis Capaian yang Telah Dicapai Serta Kendala dan Tindak Lanjut

Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 adalah suatu pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri dengan Kepala Pustan Industri untuk mewujudkan target kinerja tertentu dalam Tahun Anggaran 2020. Perjanjian Kinerja ini ditindaklanjuti dengan dirancangnya suatu Rencana Aksi 2020 untuk mencapai sasaran strategis yang ditentukan. Rencana aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 3.1 Perjakin Pusat Standardisasi Industri tahun 2020



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	1. SNI bidang industri yang diterapkan	5	Persen
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	1. Rancangan kebijakan telah disusun untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5	Rancangan
		2. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1	Naskah Akademis
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangsana dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100	Persen
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	1. Nilai akuntabilitas kinerja	80,1	Nilai


Total Anggaran Tahun 2020 : Rp. 26,800,000,000,-  
(dua puluh enam milyar delapan ratus juta rupiah)

Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri



Eko S. A. Cahyanto

Jakarta, Januari 2020  
Kepala Pusat Standardisasi Industri



Yan Sibarang Tandiele

Tabel 3.1. Rencana Aksi Pusat Standardisasi Industri Tahun 2020

RENCANA AKSI													
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI													
TAHUN ANGGARAN 2020													
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi								Penanggung Jawab	Koordinator
				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
				Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan	Target Antara	Rencana Kegiatan		
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	2%	1) Koordinasi dengan Komtek dan Sub Komtek; 2) Perencanaan perumusan RSNI 2018; 3) Rapat Teknis; 4) Rapat Konsensus; 5) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 6) Pengumpulan Data.	3%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNI; 4) Peninjauan SNI; 5) Pengumpulan Data	4%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Monitoring perumusan RSNI; 4) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun; 5) Pengumpulan Data	5%	1) Rapat Teknis; 2) Rapat Konsensus; 3) Perencanaan Perumusan RSNI tahun 2021; 4) Pengumpulan Data; 4) Pembuatan Laporan.	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah disusun untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	25%	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 4) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	50%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	75%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Mengikuti sidang Asean Framework Agreement (AFA on MRA) ASEAN untuk mendukung kegiatan keberterimaan Regulasi Teknis ditingkat ASEAN	100%	1) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 2) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 3) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional 4) Penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Penerapan, Pemberlakuan dan Kerjasama Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Penerapan dan Pemberlakuan Standardisasi Industri
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah	25%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	50%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Penyusunan konsep NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	75%	1) FGD Penyusunan konsep NA 2) Penyusunan Draft NA 3) Koordinasi dengan stakeholder	100%	1) Finalisasi Konsep NA 2) Penyusunan Laporan	- Kepala Subbidang Penguatan Standardisasi Industri - Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri	Peneliti
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangsana dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/serifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenerpin	100%	25%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Wasmattirik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	50%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terhadap produk-produk SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan pelaksanaan kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (Wasmattirik)	75%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), evaluasi hasil pengawasan LPK melalui kegiatan pertemuan teknis pengawasan LPK dan melakukan evaluasi hasil pengambilan sampel uji dengan melakukan pengujian ke laboratorium uji yang ditunjuk Menteri terhadap produk-produk yang tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang telah diberlakukan secara wajib	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan penyusunan laporan kegiatan akhir tahun dan Wasmattirik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	Kepala Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	Kepala Subbidang Pengawasan Standardisasi Industri
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja	nilai >80	25%	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) penyusunan rencana kinerja 4) penyusunan perjanjian kinerja 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja	50%	1) Penetapan Program Kegiatan 2) Konsinyering Program Kegiatan 3) penyusunan RKA-KL 4) rapat koordinasi	75%	1) Pemantauan Program Kegiatan 2) Rapat koordinasi	100%	1) penyiapan dan pengumpulan bahan laporan 2) Penyusunan Laporan Kegiatan	Kepala Bidang Perumusan dan Penguatan	Kepala Subbidang Program dan Tata Usaha

Jakarta, 2 Januari 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri,



Ni Nyoman Ambareny

### 3.1 Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja

#### 3.1.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator dalam Perjanjian Kinerja

Berikut realisasi pencapaian TRIWULAN I Perjakin Pustan Industri Tahun Anggaran 2020 seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Realisasi Pencapaian TRIWULAN I Perjakin Pustan Industri

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN I (%)		
				Rencana kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	1) Koordinasi dengan Komtek dan Sub Komtek; 2) Perencanaan perumusan RSNI 2018 3) Rapat Teknis; 4) Rapat Konsensus; 5) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun.	2%	2%
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 4) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	25%	26,3%
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	25%	20%
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Wasmatlitrik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industry	25%	20%
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) penyusunan rencana kinerja 4) penyusunan perjanjian kinerja 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja	25%	18%

## 1. Sasaran Strategis I: Tersusunnya RSNI,ST dan/atau PTC

Tabel 3.3. Pencapaian Sasaran Kegiatan I TRIWULAN I Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN I (%)		
				Rencana kegiatan	Target Fisik	Realisasi Fisik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya penerapan standardisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	1) Koordinasi dengan Komtek dan Sub Komtek; 2) Perencanaan perumusan RSNI 2018 3) Rapat Teknis; 4) Rapat Konsensus; 5) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun.	2%	2%

Sasaran Strategis I terdiri dari Indikator Kinerja :

### 1. SNI bidang industri yang diterapkan:

#### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja

- 1) Koordinasi dengan Komite Teknis di Lingkungan Kementerian Perindustrian membahas ruang lingkup dan jadwal perumusan RSNI;
- 2) Monitoring pelaksanaan perumusan standar bidang industri;
- 3) Rapat Teknis Perumusan RSNI untuk lingkup:
  - tekstil dan produk tekstil;
  - Kulit, produk kulit dan alas kaki;
  - Makanan dan Minuman

#### b. Kendala

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya tahapan pelaksanaan perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Bidang Industri, sampai dengan saat ini dari 139 usulan PNPS baru terdapat 32 RSNI dalam tahap Rapat Teknis dan belum ada RSNI yang sudah dikonsensuskan, tertunda/terhambatnya sidang harmonisasi standardisasi industri, tertundanya pelaksanaan kajian standardisasi industri untuk penyusunan kebijakan standardisasi dalam rangka mendukung Revolusi Industri 4.0; dan Kajian Efektifitas penerapan SNI produk semen.

#### c. Rekomendasi

Mempercepat pelaksanaan tahapan rapat teknis dan rapat konsensus Perumusan RSNI setelah situasi sudah memungkinkan, mengalihkan anggaran sidang untuk penanggulangan Wabah Covid-19 dan mempercepat pelaksanaan kajian setelah situasi sudah memungkinkan.

## 2. Sasaran Strategis II: Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian

Tabel 3.4. Pencapaian Sasaran Kegiatan II TRIWULAN I Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN I (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 4) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	25%	26,3%
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 Naskah Akademis	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	25%	20%

Sasaran Strategis II terdiri dari Indikator Kinerja :

**1. Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi**

Dalam rangka mendukung pemberlakuan SNI yang diberlakukan secara wajib, Pusat Standardisasi Industri menyiapkan rancangan regulasi teknis dalam penerapan dan pemberlakuan SNI wajib tersebut.

**a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Pada TRIWULAN I kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah:

- 1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan,
- 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK,
- 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK,
- 4) telah dilaksanakannya FGD Program Nasional Regulasi Teknis Tahun 2020-2021 pada tanggal 13 Maret 2020 di Jakarta,
- 5) telah terbit regulasi teknis yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib.

**b. Kendala:**

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dan penyusunan skema sertifikasi Produk SNI Wajib serta Tertunda/terhambatnya pelaksanaan sidang terkait regulasi teknis Standardisasi di tingkat ASEAN.

**c. Rekomendasi:**

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah kondusif kembali dan mengalihkan anggaran terkait menghadiri sidang-sidang dalam rangka keberterimaan

regulasi teknis ditingkat Asia menjadi anggaran untuk penanggulangan Wabah Covid-19.

## **2. Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri**

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu regulasi, dalyang disusun oleh Pusat Standardisasi Industri.

### **a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Kegiatan pada TRIWULAN I Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- 1) Pengumpulan data dan literatur,
- 2) Koordinasi dengan stakeholder.

### **b. Kendala:**

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertunda/ terhambatnya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK dan Skema sertifikasi.

### **c. Rekomendasi**

Mengikuti jadwal penyusunan Rancangan kebijakan.

## **3. Sasaran Strategis III: Terlaksananya Pengawasan dan Penegakan Hukum Proses Industri**

Tabel 3.5. Pencapaian Sasaran Strategis III TRIWULAN I Perjakin Pustan Industri TA 2020.



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN I (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin Jumlah Pelaksanaan penegakan hukum	100%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Wasmatlitrik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industry	25%	20%

Sasaran Strategis III terdiri dari indikator kinerja:

#### 1. Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin

Sehubungan dengan pelaksanaan penerapan SNI dan pemberlakuan Standardisasi Industri, maka diperlukan evaluasi terhadap kinerja LPK terkait kepatuhannya dalam menerbitkan Sertifikat Kesesuaian sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi LPK didapat berdasarkan laporan kinerja dan pengawasan LPK oleh Pustan Industri dan akan disampaikan dalam suatu pertemuan guna menjadi koreksi dan perbaikan kedepan.

##### a. Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:

- 1) Rapat koordinasi,
- 2) Pengawasan ke LPK,
- 3) monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU,
- 4) koordinasi dengan Kepolisian RI,
- 5) terselenggaranya FGD tindak lanjut pengawasan pasar BSN pada tanggal 5 dan 10 Maret 2020 di Jakarta.

##### b. Kendala:

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pengawasan LPK dan tertundanya pelaksanaan kegiatan penegakan hukum standardisasi industri berupa, kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) secara berkala/sewaktu-waktu terhadap penerapan pemberlakuan SNI wajib, Catatan: koordinasi dengan aparat penegakkan

hukum saat ini tetap dilakukan dalam bentuk koordinasi tanpa tatap muka menggunakan media elektronik.

**c.Rekomendasi:**

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan.

**4. Sasaran Strategis IV: Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi**

Tabel 3.6. Pencapaian Sasaran Kegiatan IV TRIWULAN I Perjakin Pustan Industri TA 2020

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Sasaran sampai TRIWULAN I (%)		
				Rencana Kegiatan	Target	Realisasi
					Fisik %	Fisik %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai 80.1	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) penyusunan rencana kinerja 4) penyusunan perjanjian kinerja 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja	25%	18%

Sasaran Strategis IV terdiri dari indikator kinerja:

**1. Nilai Akuntabilitas Kinerja**

**a.Hasil yang telah dicapai dan analisis capaian kinerja:**

pada TRIWULAN I kegiatan yang dilakukan yaitu:

- 1) Persiapan Pelaksanaan,
- 2) Rapat koordinasi,
- 3) tersusunnya rencana kinerja PSI 2021,
- 4) tersusunnya perjanjian kinerja PSI tahun 2020,
- 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja melalui koordinasi pengumpulan data ke Balai-Balai Industri.

**b. Kendala:**

Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya penyusunan rencana kerja PSI TA 2021.

**Rekomendasi:**

Menyegerakan pelaksanaan kegiatan yang tertunda setelah situasi memungkinkan.

**3.1.2. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator pada Kinerja Kegiatan**

Tabel 3.7 Pagu Anggaran Kegiatan TA 2020 (TRIWULAN I)

	Output	Pagu
		(Rp 000)
1860.001	Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	3.500.000
1860.002	Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	2.500.000
1860.003	Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri	900.000
1860.004	Pengembangan Standardisasi Industri	3.583.863
1860.005	Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	15.000.000
1860.010	Layanan Manajemen Satker	900.000
	JUMLAH	26.383.863

### 1. Output I: Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri

Tabel 3.8 Realisasi Output I sampai dengan TRIWULAN I TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN I			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	3.500.000				
1 Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu Untuk IKM dan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan ,Pemberlakuan Standardisasi Industri	1.842.840	23,23%	14,31%	25,00%	14,25%
2 Penyusunan Panduan Sistem Manajemen Mutu untuk IKM	131.900	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%
3 Penyusunan Regulasi Teknis Penunjukan LPK dalam Rangka Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri dan Kerjasama Pengakuan Hasil Uji dan Sertifikasi Produk dengan Negara Lain	925.260	3,34%	2,64%	34,00%	26,00%
4 Penyusunan Regulasi Pengembangan Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)	300.000	9,06%	4,22%	26,00%	14,00%
5 Penyusunan Regulasi Manajemen PPSI	300.000	24,44%	4,23%	28,33%	20,00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Pagu anggaran untuk output I sebesar Rp. 3.500.000.000,- TRIWULAN I realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

**b. Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN I Tahun Anggaran 2020

**c. Rekomendasi:**

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TRIWULAN II.

**2. Output II: Rekomendasi Hasil Pengawasan Standardisasi Industri**

Tabel 3.9 Realisasi Output II sampai dengan TRIWULAN I TA 2020

Output	Pagu (Rp 000)	TRIWULAN I			
		Keuangan		Fisik	
		S	R	S	R
		(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri</b>	<b>2.500.000</b>				
1 Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perindustrian	230.124	8,74%	0,93%	22,86%	18,00%
2 Penegakan Hukum Standardisasi Industri	769.876	4,40%	10,34%	32,50%	20,00%
3 Penyusunan Sistem Manajemen Pengawasan Standardisasi Industri	200.000	1,50%	0,00%	17,50%	10,00%
4 Forum Pengawasan Standardisasi Industri	316.160	0,00%	0,00%	19,09%	7,00%
5 Pengawasan Standardisasi Industri	983.840	17,36%	6,76%	28,74%	20,60%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:**

Output Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri pada TRIWULAN I realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

**b. Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN I Tahun Anggaran 2020

**c. Rekomendasi:**

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya.

**3. Output III: Penguatan SDM Standardisasi Industri**

Tabel 3.10 Realisasi Output III sampai dengan TRIWULAN I TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN I			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
<b>Peningkatan Kemampuan Sdm Standardisasi Industri</b>		900.000				
1	Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri	900.000	89,93%	83,21%	75,83%	66,80%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja**

Output Penguatan SDM standardisasi industri pada Triwulan I realisasi fisik untuk Pelatihan Peningkatan Kemampuan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah tercapai dengan dilaksanakan pelatihan tersebut pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020

**b. Kendala:**

-

**c. Rekomendasi:**

-

#### 4. Output IV: Perumusan dan Penguatan Standardisasi Industri

Tabel 3.11 Realisasi Output IV sampai dengan TRIWULAN I TA 2020

Output	Pagu	TRIWULAN I			
		Keuangan		Fisik	
	(Rp 000)	S	R	S	R
	(%)	(%)	(%)	(%)	
<b>Pengembangan Standardisasi Industri</b>	<b>3.583.863</b>				
Kajian Efektivitas Penerapan Sni Semen	307.201	12,09%	4,14%	22,50%	15,30%
Penyusunan Kebijakan Standardisasi Dalam Rangka Mendukung Revolusi Industri 4.0	697.869	6,76%	1,96%	20,00%	15,00%
Rapat Teknis/konsensus	2.299.483	16,53%	17,50%	25,70%	17,90%
Perencanaan Perumusan Rsn	279.310	18,98%	1,90%	41,00%	23,00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output IV sebesar Rp. 3.583.863.000,- realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran.

**b. Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN I Tahun Anggaran 2020

**c. Rekomendasi:**

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

#### 5. Output V: Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri

Tabel 3.12 Realisasi Output V sampai dengan TRIWULAN I TA 2020

Output	Pagu	TRIWULAN I			
		Keuangan		Fisik	
	(Rp 000)	S	R	S	R
	(%)	(%)	(%)	(%)	
Penguatan Kemampuan Pengujian Standardisasi Industri	15.000.000				
1 Peningkatan Kemampuan Pengujian Lab Uji Standar Wajib	15.000.000	0,54%	0,26%	46,67%	25,00%

**a. Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output V adalah sebesar Rp.15.000.000.000, realisasi keuangan belum ada karena pada

tahap Triwulan I ini tidak melaksanakan kegiatan yang mengeluarkan dana, yang terlaksana adalah realisasi fisik. Dalam realisasi fisik yang sudah dilakukan adalah melakukan permintaan dan evaluasi penawaran harga pada pihak ketiga, kemudian menyusun spesifikasi HPS yang sesuai dengan kebutuhan laboratorium dan penyusunan SK Tim Teknis untuk membantu PPK dalam penyusunan HPS dan evaluasi pengadaan di ULP

**b.Kendala:**

-

**c.Rekomendasi:**

-

## 6. Output VI: Layanan Manajemen Satker

Tabel 3.13 Realisasi Output VI sampai dengan TRIWULAN I TA 2020

Output		Pagu	TRIWULAN I			
			Keuangan		Fisik	
		(Rp 000)	S	R	S	R
			(%)	(%)	(%)	(%)
Layanan Manajemen Satker		900.000				
1	Koordinasi Penyusunan Program dan Rencana Kerja	164.505	35,12%	26,75%	37,50%	30,00%
2	Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021	296.578	1,69%	0,00%	50,00%	10,00%
3	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Persiapan Penilaian SAKIP	171.642	46,64%	37,77%	48,33%	40,00%
4	Evaluasi Rencana Strategis Pustan Industri	147.395	1,50%	0,31%	6,67%	5,00%
5	Reviu Penerapan SPIP Pusat Standardisasi Industri	119.880	3,00%	1,55%	6,67%	5,00%

**a.Hasil yang dicapai dan analisis capaian kinerja:** Pagu anggaran untuk output V sebesar Rp. 900.000.000,- realisasi keuangan tidak mencapai target begitu pula dengan realisasi fisik tidak mencapai sasaran..

**b.Kendala:**

Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi TRIWULAN I Tahun Anggaran 2020

**c.Rekomendasi:**

Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang dan percepatan kegiatan yang akan dilaksanakan pada triwulan I.

## **3.2. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan**

### **3.2.1 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja Pusat Standardiasi Industri kepada BPPI ada 4 sasaran strategis, masing-masing kegiatan mempunyai target yang harus dicapai tetapi dengan adanya hambatan dan kendala yang ada menyebabkan pencapaian target tidak diperoleh. Hambatan pada tahun 2020 adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi triwulan I tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

### **3.2.2 Hambatan dan Kendala Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan**

Kegiatan yang terdapat di Pustan Industri ada 6 (enam) Kegiatan. Sama halnya dengan pelaksanaan berdasarkan perjanjian kinerja, hambatan yang dihadapi terkait pandemi covid 19 dan mekanisme pencairan.

## **3.3 Langkah Tindak Lanjut**

### **3.3.1 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Perjanjian Kinerja**

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan pada TRIWULAN II.

### **3.3.2 Langkah dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kinerja Output Kegiatan**

Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah situasi sudah memungkinkan pada TRIWULAN II.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Secara umum kegiatan yang dilaksanakan Pusat Standardisasi Industri sampai dengan TRIWULAN I Tahun 2020 ini terdapat banyak kendala sehingga realisasi keuangan sebesar 3,76% dari target 5,10% dan realisasi fisik 22,74% dari 25,00%. Sedangkan pada TRIWULAN I Tahun 2019, Realisasi Keuangan 4,16% lebih rendah dari target yang ditentukan yaitu 11,49% dan Realisasi Fisik mencapai 20,25% dari target 17,90% pada TRIWULAN I. Permasalahan yang dihadapi adalah pandemi covid-19 yang mengakibatkan sebagian besar kegiatan yang sudah dijadwalkan menjadi tertunda pelaksanaannya sehingga mengakibatkan realisasi triwulan I tidak tercapai. Selain hal tersebut hambatan lainnya adalah terkait kebijaksanaan pencairan anggaran oleh Kementerian Keuangan melalui mekanisme Ganti Uang Persediaan (GUP) dan meniadakan mekanisme Lumsum (LS) yang mengakibatkan antrian proses pencairan anggaran sehingga realisasi tidak tercapai.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada dalam pencapaian TRIWULAN I, Pusat Standardisasi Industri akan melaksanakan kegiatan dengan seefektif dan seefisien mungkin dan turut berkoordinasi dengan BPPI, Direktorat dan lembaga terkait dalam menyelesaikan kegiatan yang ada.

Jakarta, 3 April 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri



**Ni Nyoman Ambareny**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020  
PUSAT STANDARDISASI INDUSTRI**

**I. DATA UMUM**

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (248035) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri  
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi  
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi  
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.12. Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri  
 5. Indikator Hasil :  
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1860 - Pengembangan, Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Industri**  
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1  
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir Ni Nyoman Ambareny, M.Si.  
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 20  
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA A-019.07.1.248035/2020

**II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN**

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
001 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri		-	3.500.000	3.500.000		21 Regulasi
002 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan		-	2.500.000	2.500.000		10 Rekomendasi
003 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri		-	900.000	900.000		40 Orang
004 Pengembangan Standardisasi Industri		-	3.583.863	3.583.863		100 Standar
005 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian		-	15.000.000	15.000.000		13 Unit
010 Layanan Manajemen Satker		-	900.000	900.000		1 Laporan
<b>Total</b>		-	<b>26.383.863</b>	<b>26.383.863</b>		

### III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
001 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	-	-	-	-	9,99	8,38	18,25	17,29	9,99	8,38	18,25	17,29	DKI JAKARTA
002 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan	-	-	-	-	4,11	5,27	17,38	17,61	4,11	5,27	17,38	17,61	DKI JAKARTA
003 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	-	-	-	-	61,57	13,51	49,91	50,00	61,57	13,51	49,91	50,00	DKI JAKARTA
004 Pengembangan Standardisasi Industri	-	-	-	-	8,72	4,52	17,17	17,51	8,72	4,52	17,17	17,51	DKI JAKARTA
005 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	-	-	-	-	0,28	0,18	25,00	25,00	0,28	0,18	25,00	25,00	DKI JAKARTA
010 Layanan Manajemen Satker	-	-	-	-	12,81	8,01	17,89	17,89	12,81	8,01	17,89	17,89	DKI JAKARTA
<b>Jumlah</b>	-	-	-	-	<b>5,60</b>	<b>3,06</b>	<b>22,93</b>	<b>22,87</b>	<b>5,60</b>	<b>3,06</b>	<b>22,93</b>	<b>22,87</b>	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	001 Tersedianya Regulasi Teknis Standardisasi Industri	- FGD Perencanaan Regulasi Teknis dalam rangka kegiatan Penyusunan Regulasi Teknis Skema Penerapan, Pemberlakuan Standardisasi Industri ada yang telah dilaksanakan, dokumen pertanggung jawaban telah diajukan ke KPPN Jakarta untuk menjadi SP2D, akan tetapi sampai saat ini SP2D tersebut belum terbit, sehingga mempengaruhi realisasi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020, ini kemungkinan pengaruh dari masa darurat COVID 19	- Bagian Keuangan BPPI berkoordinasi dengan KPPN Jakarta VII	- Bagian Keuangan BPPI dan KPPN Jakarta VII.
2.	002 Pengawasan dan Penegakan Hukum terkait Penerapan Pemberlakuan Standardisasi Industri	- Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal hingga realisasi tidak tercapai.	- Koordinator dan pelaksana kegiatan melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang akan dilaksanakan.	- PPK, Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan
3.	003 Peningkatan Kemampuan SDM Standardisasi Industri	- Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19, kegiatan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga berpengaruh pada realisasi Triwulan I Tahun Anggaran 2020	- Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang akan dilaksanakan,	- PPK, Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan,
4.	004 Pengembangan Standardisasi Industri	- Pengaruh dari masa keadaan darurat COVID 19 ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal, sehingga realisasi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020 tidak tercapai.	- Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang akan dilaksanakan.	- PPK, Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan
5.	005 Penguatan Kemampuan Lembaga Penilaian Kesesuaian	- Lelang Cepat telah dilaksanakan, Menunggu Proses Penetapan Pemenang	- Apabila tidak ada sanggahan ULP secepatnya menetapkan pemenang lelang cepat agar segera dilakukan penandatanganan Kontrak antara PPK dan Pemenang Lelang Cepat.	- ULP
6.	010 Layanan Manajemen Satker	- Pengaruh dari masa Keadaan darurat COVID 19 ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal sehingga realisasi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2020 tidak tercapai.	- Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang akan dilaksanakan	- PPK, Koordinator Kegiatan dan Pelaksana Kegiatan.

Jakarta Selatan, 5 April 2020

Kepala Pusat Standardisasi Industri, BPPI.



Ni Nyoman Ambareny

**LAMPIRAN 2**  
**FORM PENGUKURAN RENCANA AKSI**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN I				Kendala/Permasalahan
				% Fisik		Kegiatan		
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya penerapan standarisasi industri dalam rangka mendukung kemampuan industri dalam negeri	SNI bidang industri yang diterapkan	5%	2	2	1) Koordinasi dengan Komtek dan Sub Komtek; 2) Perencanaan perumusan RSNI 2018 3) Rapat Teknis; 4) Rapat Konsensus; 5) Peninjauan SNI lebih dari 5 tahun.	1) Koordinasi dengan Komite Teknis di Lingkungan Kementerian Perindustrian membahas ruang lingkup dan jadwal perumusan RSNI; 2) Monitoring pelaksanaan perumusan standar bidang industri; 3) Rapat Teknis Perumusan RSNI untuk lingkup: - tekstil dan produk tekstil; - Kulit, produk kulit dan alas kaki; - Makanan dan Minuman	Masih lemahnya kesadaran masyarakat khususnya pelaku usaha untuk menerapkan SNI. - Kurangnya infrastruktur khususnya sarana pengujian. - Belum efektifnya penerapan Perpres Nomor 16 tahun 2018 untuk mendorong penggunaan produk ber-SNI - Keterbatasan anggaran untuk kaji ulang SNI Bidang Industri yang sudah berumur ≥ 5 thn. (± 80% dari 4.984 SNI Bidang Industri)
2	Tersedianya kebijakan pembangunan industri berdasarkan hasil review /kajian	Rancangan kebijakan telah diusulkan untuk ditindaklanjuti/diharmonisasi	5 Rancangan	25%	26,3%	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 4) Menyiapkan peta kompetensi LPK dalam rangka Keberterimaan di tingkat nasional, regional dan internasional	1) Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 2) Evaluasi, Verifikasi dan Penilaian LPK 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri tentang Penunjukan LPK 4) telah dilaksanakannya FGD Program Nasional Regulasi Teknis Tahun 2020-2021 pada tanggal 13 Maret 2020 di Jakarta	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN I				Kendala/Permasalahan
				% Fisik		Kegiatan		
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							5) telah terbit regulasi teknis yaitu Peraturan Menteri Perindustrian No 6 Tahun 2020 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit Secara Wajib	
		Naskah Akademis Rancangan Peraturan Menteri terkait Standardisasi Industri	1 naskah Akademis	25%	20%	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	1) Pengumpulan data dan literatur 2) Koordinasi dengan stakeholder	
3	Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan	Kepatuhan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam menerbitkan SPPT SNI/sertifikat kesesuaian sesuai regulasi Kemenperin	100%	25%	20%	Pengawasan berkala dan sewaktu-waktu terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Wasmatlitrik berkala dan sewaktu-waktu dalam rangka pemberlakuan SNI Wajib di bidang industri	1) Rapat koordinasi 2) Pengawasan ke LPK 3) monitoring pelaporan SPPT SNI dan SHU 4) koordinasi dengan Kepolisian RI 5) terselenggaranya FGD tindak lanjut pengawasan pasar BSN pada tanggal 5 dan 10 Maret 2020 di Jakarta	Dampak Covid-19 terhadap program kerja PSI mengakibatkan tertundanya pelaksanaan Pengawasan LPK dan tertundanya pelaksanaan kegiatan penegakan hukum standardisasi industri berupa, kegiatan Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan (WASMATLITRIK) secara berkala/sewaktu-waktu terhadap penerapan pemberlakuan SNI wajib, saat ini koordinasi dengan aparat penegakan hukum saat ini tetap dilakukan dalam bentuk koordinasi tanpa tatap muka menggunakan media elektronik

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	TRIWULAN I				Kendala/Permasalahan
				% Fisik		Kegiatan		
				Target Antara	Realisasi	Rencana	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas	>80.1	25%	18%	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) penyusunan rencana kinerja 4) penyusunan perjanjian kinerja 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja	1) Persiapan Pelaksanaan 2) Rapat koordinasi 3) tersusunnya rencana kinerja PSI 2021 4) tersusunnya perjanjian kinerja PSI tahun 2020 5) penyiapan dan pengumpulan bahan rencana kerja melalui koordinasi pengumpulan data ke Balai-Balai Industri	Dampak Covid-19 mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan Konsinyering Penyusunan Program dan Rencana Kerja 2021